

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2013 DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG**

Almukarrom Putra Anugrah¹, Deby Chintia Hestiriniah²

Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka Palembang^{1,2}

email : almukarromputra@gmail.com

Diterima: 5/7/2026; Direvisi: 16/7/2026; Diterbitkan: 23/7/2026

ABSTRAK

Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (Anjal, Gelandangan, dan Pengemis) masih menjadi permasalahan sosial di Kota Palembang meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi nonpartisipan dan dokumentasi terhadap aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta dokumen pelaksanaan kebijakan di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui patroli, penjangkauan, penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Namun, efektivitasnya masih belum optimal akibat keterbatasan komunikasi kebijakan, sumber daya, perubahan perilaku kelompok sasaran, dan koordinasi lintas instansi. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila penegakan regulasi diintegrasikan dengan pembinaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan sinergi lintas sektor secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.*

ABSTRACT

The presence of street children, homeless individuals, and beggars remains a persistent social issue in Palembang City despite the enactment of Palembang City Regional Regulation No. 12 of 2013 concerning the Development of Street Children, Homeless Individuals, and Beggars. This condition indicates that policy implementation has not yet fully achieved its objectives of social development and rehabilitation. This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation No. 12 of 2013 in addressing street children, homeless individuals, and beggars in Palembang City. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through non-participant observation and documentation of the activities of street children, homeless individuals, and beggars, as well as policy implementation documents from the Palembang City Social Affairs Office and the Municipal Civil Service Police Unit. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model based on George C. Edwards III's policy implementation framework. The findings reveal that the policy has been implemented through patrols, outreach, law enforcement, social guidance, and rehabilitation programs. However, its effectiveness remains limited due to inadequate

policy communication, insufficient resources, low behavioral change among the target groups, and weak inter-agency coordination. This study demonstrates that effective policy implementation depends not only on regulatory enforcement but also on the integration of social rehabilitation, economic empowerment, and cross-sector collaboration to ensure sustainable management of street children, homeless individuals, and beggars.

Keywords: *Policy Implementation, Street Children, Homeless Individuals, Beggars.*

PENDAHULUAN

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ulumudin, Juliasih, & Kurniawan, 2021). Keberadaan mereka tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga memengaruhi ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, dan kualitas pelayanan publik di kawasan perkotaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan PMKS merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan kesejahteraan sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan (Roy et al., 2024). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak dapat hanya berorientasi pada penertiban, tetapi harus diimbangi dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial agar mampu mengurangi keberadaan mereka secara berkelanjutan (Rachmawati & Faedlulloh, 2021; Hasanah & Karimah, 2024).

Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penjangkauan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan penegakan ketertiban (Purnamawati, 2021). Selain mengatur kewajiban pemerintah daerah, peraturan tersebut juga melarang aktivitas meminta-minta di tempat umum serta pemberian uang oleh masyarakat di lokasi yang dilarang. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan yang efektif (Permatasari, 2020). Sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan sehingga kegagalan pada salah satu aspek dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Meskipun Perda telah diberlakukan selama lebih dari satu dekade, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih ditemukan di berbagai titik Kota Palembang. Pemberitaan sepanjang tahun 2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan patroli, penjangkauan, dan operasi penertiban, namun aktivitas kelompok sasaran tetap berulang di sejumlah persimpangan jalan utama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku maupun penyelesaian masalah secara berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Maulydina dan Jannah (2023) yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan pemerintah, tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan yang membentuk pilihan hidup kelompok sasaran. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat diketahui faktor-faktor yang masih menghambat pencapaian tujuan Peraturan Daerah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari berbagai perspektif. Rachmawati dan Faedlulloh

(2021) menyoroti dinamika pelaksanaan program pelayanan PMKS anak jalanan, sedangkan Alim (2023) menelaah implementasi program penanganan PMKS anak jalanan di Kota Bogor. Penelitian Utama dan Gorda (2024) membahas strategi penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Mataram, sementara Hasanah dan Karimah (2024) menekankan pentingnya peran pekerja sosial dalam rehabilitasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Di sisi lain, Nelciana (2022) mengevaluasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis di Surabaya, sedangkan Khanim (2026) serta Sugiono dan Sholichah (2026) mengkaji implementasi dan evaluasi Peraturan Daerah mengenai penanggulangan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Mataram dan Kota Pasuruan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan di daerah lain atau pada aspek pelayanan dan penertiban sehingga belum secara khusus mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 setelah lebih dari satu dekade diberlakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang saat ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam konteks dinamika sosial terkini. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan implementasi berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana keberlanjutan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan partisipasi masyarakat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kebijakan publik dan penyelesaian masalah kesejahteraan sosial di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada bidang kesejahteraan sosial, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Palembang, penelitian ini juga diharapkan memperluas pengembangan teori implementasi kebijakan melalui penjelasan mengenai pentingnya sinergi antara implementasi regulasi, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan penanganan PMKS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sulistyo, 2025) untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Maret 2026 di beberapa lokasi yang menjadi pusat aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, seperti persimpangan lampu merah dan kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, yang dipilih secara purposive berdasarkan intensitas aktivitas kelompok sasaran dan lokasi patroli Pemerintah Kota Palembang. Unit analisis penelitian meliputi aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, bentuk implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Majid, 2021). Data primer diperoleh melalui observasi nonpartisipan terhadap aktivitas kelompok sasaran dan pelaksanaan penanganan di

lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013, laporan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, publikasi resmi pemerintah, berita daring, serta literatur ilmiah yang relevan. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi yang memuat aspek lokasi, waktu, bentuk aktivitas, karakteristik objek, dan pelaksanaan kebijakan, serta lembar dokumentasi untuk menginventarisasi dokumen yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis serta bentuk implementasi kebijakan di lokasi penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Kriyantono, 2022). Data kemudian diinterpretasikan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi dan dokumentasi serta triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, pemberitaan media, dan literatur ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013, penelitian ini melakukan observasi pada beberapa lokasi yang menjadi pusat aktivitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang. Observasi difokuskan pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, kondisi faktual kelompok sasaran, serta respons pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan penertiban. Selain itu, pengamatan juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Ringkasan hasil observasi tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar analisis implementasi kebijakan berdasarkan perspektif George C. Edwards III.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Observasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013

Aspek Observasi	Temuan Utama
Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis	Masih ditemukan pada sejumlah persimpangan utama, terutama pada pagi, siang, dan sore hingga malam hari.
Bentuk implementasi kebijakan	Pemerintah melaksanakan patroli, penjangkauan, pendataan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Efektivitas implementasi	Sebagian besar kelompok sasaran kembali beraktivitas beberapa hari setelah penertiban sehingga penanganan belum berkelanjutan.
Faktor penghambat	Pemberian uang oleh masyarakat, keterbatasan pembinaan lanjutan, serta rendahnya perubahan perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan ringkasan hasil observasi pada Tabel 1, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan telah menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun demikian, berbagai dinamika yang ditemukan selama penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional sehingga belum mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada intensitas pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh keterkaitan antara aspek kelembagaan, dukungan masyarakat, dan keberlanjutan proses rehabilitasi serta pemberdayaan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, temuan observasi ini menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih mendalam implementasi kebijakan melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pada bagian pembahasan.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilaksanakan, efektivitas implementasi masih belum optimal. Sebagian besar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kembali beraktivitas pada lokasi yang sama setelah mengikuti proses pembinaan. Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hasil observasi menunjukkan bahwa perilaku masyarakat yang masih memberikan uang di ruang publik turut mendorong keberlanjutan aktivitas tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku kelompok sasaran maupun masyarakat sehingga tujuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 belum tercapai secara optimal.

Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian, temuan lapangan dirangkum berdasarkan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kondisi implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. Pengelompokan temuan pada setiap aspek implementasi juga memudahkan proses identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian, tabel berikut menjadi dasar analisis lebih lanjut untuk menginterpretasikan efektivitas implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Berdasarkan Model George C. Edwards III

Aspek Implementasi	Indikator	Temuan Penelitian	Kesimpulan
Komunikasi	Sosialisasi, penyampaian informasi, dan pemahaman masyarakat	Pemerintah melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, patroli, penjangkauan, serta mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Namun, sebagian masyarakat masih memberikan uang dan kelompok sasaran kembali beraktivitas di jalan setelah pembinaan.	Komunikasi telah dilaksanakan, tetapi efektivitasnya belum optimal karena belum mampu membangun kepatuhan masyarakat dan mengubah perilaku kelompok sasaran secara berkelanjutan.

Aspek Implementasi	Indikator	Temuan Penelitian	Kesimpulan
Sumber Daya	SDM, kewenangan, sarana, dan pelaksanaan program	Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki personel, kewenangan, serta melaksanakan patroli, penjangkauan, pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, pembinaan lanjutan dan pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal sehingga sebagian kelompok sasaran kembali ke jalan.	Sumber daya tersedia sesuai amanat Peraturan Daerah, tetapi pemanfaatannya belum mampu mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Disposisi	Komitmen pelaksana dan respons kelompok sasaran	Aparatur menunjukkan komitmen melalui operasi gabungan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan pendataan. Namun, perubahan perilaku kelompok sasaran masih rendah akibat tekanan ekonomi, keterbatasan pekerjaan, dan masih adanya masyarakat yang memberikan uang.	Komitmen implementor sudah baik, tetapi keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh rendahnya perubahan perilaku kelompok sasaran.
Struktur Birokrasi	Pembagian tugas, koordinasi, dan mekanisme pelaksanaan	Dinas Sosial dan Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai kewenangan serta berkoordinasi melalui operasi gabungan dan layanan pengaduan masyarakat. Akan tetapi, koordinasi masih lebih berorientasi pada penertiban daripada rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.	Struktur birokrasi telah terbentuk dengan jelas, namun koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.
Sintesis Implementasi	Efektivitas kebijakan secara keseluruhan	Implementasi Peraturan Daerah telah berjalan melalui patroli, penjangkauan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan sosialisasi. Namun, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih ditemukan di berbagai titik Kota Palembang sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.	Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh interaksi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta memerlukan penguatan pemberdayaan sosial-ekonomi dan partisipasi masyarakat agar penanganan PMKS lebih berkelanjutan.

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan telah berlangsung sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada terlaksananya program atau kegiatan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pelaksana dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi kelompok sasaran. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk melakukan analisis yang

lebih mendalam terhadap masing-masing dimensi implementasi kebijakan guna menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada interpretasi setiap dimensi implementasi berdasarkan perspektif George C. Edwards III dengan mengaitkannya pada teori, hasil penelitian terdahulu, serta kondisi empiris yang ditemukan di Kota Palembang.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis merupakan instrumen kebijakan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan ketertiban umum sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penjangkauan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah dijalankan melalui patroli rutin, operasi penertiban, pembinaan awal, rehabilitasi sosial, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di ruang publik. Namun demikian, keberadaan kelompok sasaran masih ditemukan pada berbagai persimpangan utama di Kota Palembang sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dijelaskan dalam konsep implementasi kebijakan publik oleh Afifah dan Desrinelti (2021). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Berlian et al. (2023) serta Sakir et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan di berbagai daerah masih menghadapi tantangan berupa tingginya intensitas kemunculan kembali kelompok sasaran meskipun operasi penertiban telah dilakukan secara berkala.

Ditinjau dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menyampaikan substansi kebijakan melalui sosialisasi, penyuluhan, patroli, dan penjangkauan kepada masyarakat maupun kelompok sasaran. Akan tetapi, komunikasi tersebut belum mampu menghasilkan perubahan perilaku secara berkelanjutan karena sebagian masyarakat masih memberikan uang kepada anak jalanan dan pengemis, sedangkan kelompok sasaran kembali beraktivitas setelah memperoleh pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi kepatuhan sosial. Temuan ini selaras dengan Darmayanthi dan Kurniawan (2021) yang menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) harus berlangsung secara partisipatif agar mampu mengubah perilaku penerima manfaat. Selain itu, Maulydina dan Jannah (2023) menegaskan bahwa perubahan perilaku anak jalanan memerlukan intervensi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi juga dipengaruhi oleh budaya sosial masyarakat yang masih memandang pemberian uang sebagai bentuk kepedulian sehingga pendekatan edukatif dan persuasif perlu diperkuat.

Pada aspek sumber daya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki personel, kewenangan, serta mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan patroli, penjangkauan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, masih ditemukannya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis pada lokasi yang sama setelah operasi penertiban menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya belum mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Alim (2023), Utama dan Gorda (2024), serta Siburian dan Thamrin (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas program rehabilitasi, pembinaan lanjutan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi menjadi faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan penanganan PMKS.

Penelitian Moni dan Susilo (2022) maupun Nelciana (2022) juga menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial terhadap gelandangan dan pengemis akan lebih efektif apabila didukung oleh fasilitas rehabilitasi yang memadai serta pendampingan pascarehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan sosial-ekonomi memiliki peran yang sama pentingnya dengan kecukupan sumber daya dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Aspek disposisi menunjukkan bahwa aparat Pemerintah Kota Palembang memiliki komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah melalui operasi gabungan, pembinaan, rehabilitasi sosial, dan pendataan terhadap kelompok sasaran. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku kelompok sasaran karena sebagian individu kembali beraktivitas di ruang publik setelah memperoleh pembinaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, terbatasnya akses terhadap pekerjaan, serta masih tingginya dukungan masyarakat dalam bentuk pemberian uang di jalan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hasanah dan Karimah (2024) yang menekankan pentingnya keterlibatan pekerja sosial masyarakat dalam membangun kemandirian penerima manfaat, serta didukung oleh Khanim (2026) yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sangat bergantung pada keberlanjutan rehabilitasi sosial dan perubahan perilaku kelompok sasaran. Oleh karena itu, disposisi implementor perlu didukung oleh intervensi sosial yang mampu meningkatkan motivasi, kemandirian ekonomi, dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang berlaku.

Pada aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan sesuai fungsi masing-masing serta didukung oleh koordinasi melalui patroli bersama dan layanan pengaduan masyarakat. Akan tetapi, koordinasi tersebut masih lebih berorientasi pada penertiban dibandingkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan pascapembinaan sehingga penanganan cenderung bersifat responsif. Temuan ini selaras dengan Pabia, Matsunami, dan Subanu (2022) yang menegaskan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan penting dalam implementasi kebijakan publik karena memungkinkan terbangunnya sinergi antarlembaga, masyarakat, dan organisasi nonpemerintah. Hasil penelitian Tianty, Robby, dan Zuhri (2021) juga menunjukkan bahwa penanganan PMKS memerlukan kolaborasi lintas sektor agar program rehabilitasi tidak berhenti pada operasi penertiban semata. Selain itu, Panjaitan (2022) dan Sari (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan anak jalanan di berbagai daerah akan lebih efektif apabila didukung koordinasi yang terintegrasi sejak tahap penjangkauan hingga reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh pembagian kewenangan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi dan kesinambungan layanan antarinstansi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 telah berjalan sesuai kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterkaitan antara aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa faktor eksternal berupa budaya masyarakat, keberlanjutan pemberdayaan sosial-ekonomi, serta tingkat kerentanan sosial perkotaan turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Roy et al. (2024) dan Wang, Shu, dan Yuan (2024) mengenai pentingnya memahami kerentanan sosial dalam perumusan kebijakan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memerlukan penguatan komunikasi publik, peningkatan

kapasitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi lintas sektor secara berkesinambungan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanganan PMKS tidak hanya dipengaruhi oleh empat dimensi implementasi George C. Edwards III, tetapi juga oleh interaksi antara keberlanjutan program pemberdayaan sosial-ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, dan kerentanan sosial perkotaan yang bersama-sama menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pada tingkat pemerintah daerah.

KESIMPULAN

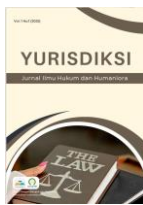
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur melalui kegiatan penjangkauan, penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi sosial, namun efektivitasnya belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan kebijakan dalam mengurangi keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di ruang publik secara berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori George C. Edwards III, tetapi juga ditentukan oleh keberlanjutan program pemberdayaan sosial-ekonomi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penguatan perspektif implementasi kebijakan kesejahteraan sosial yang menempatkan pemberdayaan sosial-ekonomi dan partisipasi masyarakat sebagai faktor yang saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan regulasi, tetapi juga pada penguatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis implementasi kebijakan di Kota Palembang sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi pada konteks daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas program pemberdayaan sosial-ekonomi terhadap perubahan perilaku kelompok sasaran, menganalisis penerapan model *collaborative governance* dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, atau melakukan studi komparatif implementasi kebijakan di berbagai daerah. Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan model implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat sekaligus memperkaya pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M., & Desrinelti, D. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. [10.29210/3003906000](https://doi.org/10.29210/3003906000)
- Al Ghazi Masnul Alim, A. G. (2023). Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Kota Bogor (Doctoral Dissertation, Universitas Sultang Ageng Tirtayasa). <http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/22224>
- Alim, A. G. M. (2023). Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bogor. *Epistemik: Indonesian Journal Of Social And Political Science*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.57266/Epistemik.V4i1.106>

- Berlian, R., Pastika, A., & Ivanna, J. (2023). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Jln. Wiliam Iskandar Simpang Akasara). *Jipdas (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 1(2), 34-41. <https://Backup-Ejournal.Lpipb.Com/Index.Php/Jipdas/Article/View/95>
- Darmayanthi, N. P. R., & Kurniawan, B. (2021, December). Communication In The Implementation Of Child Social Welfare Program (Pkasa) As An Effort To Fulfill Welfare Of Street Children. In *International Joint Conference On Arts And Humanities 2021 (Ijcah 2021)* (Pp. 584-591). Atlantis Press. [10.2991/Assehr.K.211223.100](https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.100)
- Hasanah, N., & Karimah, F. (2024). Addressing Street Children, Vagrants, And Beggars Through The Role Of Community Social Workers In Yogyakarta A Practical And Theoretical Approach. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(1), 1-20. <https://doi.org/10.14421/Welfare.2024.131-01>
- Khanim, K. (2026). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Mataram. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(1). <https://doi.org/10.35450/Jip.V14i1.1713>
- Mauliydina, Y., & Jannah, L. M. (2023). Intervention Of Public Policy On Behavior Change Of Street Children In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), 371-382. <https://doi.org/10.26858/Jiap.V13i1.48502>
- Moni, N., & Susilo, K. D. (2022). Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Pengemis Dan Gelandangan Di Pondok Sosial Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Soetomo Administration Reform Review*, 1(3), 511-522. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/Sar/Article/View/5170>
- Nelciana, M. (2022). *Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Pengemis Dan Gelandangan Di Pondok Sosial Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya* (Doctoral Dissertation, Universitas Dr. Soetomo Surabaya). <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/3525>
- Pabia, Y. S., Matsunami, J., & Subanu, L. (2022). Collaborative Governance In Child-Friendly City Policy Implementation In Kendari City, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 6(2), 249-266. <https://doi.org/10.36574/Jpp.V6i2.328>
- Panjaitan, J. S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Psk)(Studi Kasus Simpan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan). <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/17215>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *Thejournalish: Social And Government*, 1(1), 33-37. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal Of Political Issues*, 2(2), 67-78. <https://doi.org/10.33019/Jpi.V2i2.38>
- Roy, S., Majumder, S., Bose, A., & Chowdhury, I. R. (2024). Mapping The Vulnerable: A Framework For Analyzing Urban Social Vulnerability And Its Societal Impact. *Societal Impacts*, 3, 100049. <https://doi.org/10.1016/J.Socimp.2024.100049>



- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19-26. <https://doi.org/10.58878/Sutasoma.V2i1.247>
- Sari. (2022). The Implementation Of Street Children Development Policy In The West Jakarta Social Sub-Agency. Publika Jurnal Administrasi Publik. <https://doi.org/10.47007/Publika.V10i1.4279>
- Siburian, R., & Thamrin, H. (2024). Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Pusat Kota Medan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 120-126. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13347871>
- Sugiono Sugiono, & Nihayatus Sholichah. (2026). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pasuruan Jawa Timur. *Risoma : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 190–200. <https://doi.org/10.62383/Risoma.V4i1.1487>
- Tianty, M., Robby, U. B., & Zuhri, S. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus: Pmks Golongan Anak Pada Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta). *Pandita: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.61332/Ijpa.V4i1.19>
- Utama, P. N., & Gorda, E. S. (2024). Implementation Of Street Children Handling Strategies By The Social Services Department Of Mataram City. *Eduvest-Journal Of Universal Studies*, 4(11), 10735-10751. <https://doi.org/10.59188/Eduvest.V4i11.49922>
- Wang, Y., Shu, J., & Yuan, Y. (2024). Navigating Urban Risks For Sustainability: A Comprehensive Evaluation Of Urban Vulnerability Based On A Pressure–Sensitivity–Resilience Framework. *Sustainable Cities And Society*, 117, 105961. <https://doi.org/10.1016/J.Scs.2024.105961>